



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor SOP	41
Tanggal Pembuatan	19 Mei 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	19 Mei 2021
Ditetapkan Oleh	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Nama SOP	<b>AUDIT KETAATAN</b>
----------	-----------------------

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat

**Kualifikasi Pelaksanaan**

1. Para Pejabat Struktural
2. Para Pejabat Fungsional

**Keterkaitan**

1. SOP Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. SOP Pemeriksaan Reguler
3. SOP Pemeriksaan Khusus/ Pengaduan Masyarakat
4. SOP Penyusunan Tim Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
5. SOP Audit Kinerja

**Peralatan/ Perlengkapan**

1. Sarana/ prasarana Audit/ tindak lanjut
2. Dokumen dari Audit

**Peringatan**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada kualitas hasil audit

**Pencatatan dan Pendataan**

Diisi apabila setelah dilaksanakan ada kendala/ hambatan

No	Kegiatan	PELAKSANA							MUTU BUKU			Ket	
		Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Inspektur	Irbab	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota	Auditi	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Penyusunan rencana audit ketaatan meliputi : Menentukan unti-unit kerja yang akan diaudit, jadwal audit dan menyiapkan instrumen audit									Konsep Surat Perintah	1 Hari	Surat perintah	
2.	Tahap pengumpulan data berupa : Peraturan, pelaksanaan peraturan, prosedur, standar dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang									Survey Pendahuluan Berkas Peraturan	2 Hari	- Penentuan area potensial audit - PKP	
3.	Tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi : a. Administrasi umum pemerintahan terdiri dari kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, dan barang daerah b. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi dan tugas pembantu c. Sasaran pemerintah ketaatan meliputi : Ketaatan terhadap peraturan, pelaksanaan peraturan, prosedur, standar dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang									- PKP - Pengujian rinci berkas/ dokumen	5 Hari	Kertas kerja pemeriksaan	
4.	Terhadap pelaporan dan diseminasi hasil audit. Keseluruhan hasil audit harus dilaporkan kepada Bupati, dan disampaikan kepada unit yang diaudit									Naskah hasil pemeriksaan Kertas Kerja Audit	2 Hari	laporan Naskah pemeriksaan	
5.	Terhadap pelaporan dan diseminasi hasil audit harus dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada unit yang di audit										1 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan	
	Jumlah audit/ pemeriksaan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan										11 Hari		